

PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Khaerani Aprilia¹, Erlin Kurniati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

khaeraniaprilaa@gmail.com

ABSTRACT; *Regional development is a complex process and requires synergy between the government and the community to achieve optimal results. The government has a role as a regulator, facilitator, and executor in development policies, while the community plays a role as a strategic partner who participates in planning, implementing, and evaluating development. However, in its implementation, various challenges such as complicated bureaucracy, budget constraints, low community participation, and resource inequality are factors that hinder effective development. This study uses a literature review method by analyzing various scientific sources related to the role of government and community in regional development management. The results of the study show that strong collaboration between the government and the community can increase the effectiveness of development through a participatory approach, policy transparency, and community empowerment. Strategies such as bureaucratic reform, optimizing regional budgets, increasing human resource capacity, and community education are key to increasing the effectiveness of sustainable regional development. Therefore, a more integrative approach based on local needs is needed so that regional development can run inclusively and have a positive impact on community welfare.*

Keywords: *Regional Development, Role of Government, Community Participation, Development Management, Literature Review.*

ABSTRAK; Pembangunan daerah merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor dalam kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan sebagai mitra strategis yang turut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan seperti birokrasi yang berbelit, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan sumber daya menjadi faktor penghambat pembangunan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait peran pemerintah dan masyarakat dalam manajemen pembangunan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pembangunan melalui pendekatan partisipatif, transparansi kebijakan, dan pemberdayaan komunitas. Strategi seperti reformasi birokrasi, optimalisasi anggaran daerah, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia, serta edukasi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis kebutuhan lokal agar pembangunan daerah dapat berjalan secara inklusif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan Daerah, Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Manajemen Pembangunan, Literatur Review.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam proses ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator utama yang mengarahkan kebijakan, regulasi, dan program pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan Masyarakat (Anindita Trinura Novitasari, 2022). Dengan adanya kebijakan yang terstruktur, pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah juga memastikan distribusi sumber daya yang adil sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial.

Selain itu, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Pemerintah pusat memberikan arahan makro, sementara pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi lokal. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah juga menjadi aspek penting agar pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai elemen pemerintahan sangat diperlukan dalam menjalankan manajemen pembangunan daerah.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung pembangunan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai permasalahan yang dihadapi serta solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Melalui musyawarah desa atau forum diskusi publik, masyarakat dapat mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan Mereka (Aini & Puspitawati, 2019).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran atau praktik korupsi. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya akan lebih peduli terhadap pembangunan di lingkungan mereka. Pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan pembangunan, mereka akan lebih aktif berkontribusi dalam program-program yang dicanangkan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan juga penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang ideal adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang saling mendukung.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang berbasis pada data dan kajian yang komprehensif. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari (Akmaruzzaman et al., 2013). Pemerintah daerah harus melakukan analisis kebutuhan dan potensi wilayah untuk menentukan strategi pembangunan yang tepat. Selain itu, kebijakan yang diambil harus bersifat inklusif agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.

Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan sektor swasta, untuk mendapatkan masukan yang objektif. Regulasi yang diterapkan harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat agar dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, program pembangunan harus berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk menghindari ketimpangan dalam alokasi sumber daya. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas program dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Pemerintah juga harus bersikap transparan dalam menyampaikan laporan pembangunan kepada masyarakat. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang optimal.

Sementara itu, masyarakat dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti musrenbang dan forum konsultasi publik. Dengan adanya ruang partisipasi yang terbuka, masyarakat

dapat menyuarakan aspirasi mereka mengenai kebutuhan pembangunan yang paling mendesak.

Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam implementasi program pembangunan melalui kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Budaya gotong royong yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dapat menjadi modal sosial dalam mempercepat pembangunan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga hasil pembangunan agar tetap berkelanjutan. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun (Hilman & Asmoro, 2020). Kesadaran kolektif dalam menjaga fasilitas publik dapat memperpanjang umur pemanfaatan infrastruktur. Dalam bidang ekonomi, masyarakat juga dapat mendukung pembangunan dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan daerah juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan sektor swasta. Pemerintah dapat menggandeng investor untuk mendukung proyek pembangunan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan adanya investasi dari sektor swasta, pembiayaan pembangunan dapat lebih ringan dan memungkinkan percepatan dalam pelaksanaan proyek. Namun, dalam melibatkan sektor swasta, pemerintah harus memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, regulasi yang mengatur keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan harus dibuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proyek pembangunan yang dikerjasamakan dengan swasta tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, integrasi berbagai elemen dalam pembangunan daerah harus terus diperkuat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan (Falatehan & Siswanto, 2019).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam manajemen pembangunan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi

efektivitas peran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis data. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah. Dengan memahami dinamika antara kedua pihak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam perbaikan manajemen pembangunan daerah agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran pemerintah dan masyarakat dalam manajemen pembangunan daerah. Observasi langsung dilakukan di lokasi-lokasi pembangunan untuk memahami implementasi program pembangunan serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Observasi ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembangunan serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis kebijakan pembangunan daerah yang telah diterapkan serta laporan-laporan terkait. Dengan analisis dokumen, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai manajemen pembangunan daerah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam data yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan berbasis bukti untuk perbaikan manajemen pembangunan daerah.

Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup berbagai teori dan konsep terkait pembangunan daerah, partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah dalam manajemen pembangunan. Salah satu teori yang relevan adalah teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan. Teori ini mendukung konsep bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

Selain itu, konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi landasan utama dalam memahami peran pemerintah dalam pembangunan daerah. *Good*

governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan kebijakan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan mencegah terjadinya korupsi serta penyalahgunaan anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga didukung oleh teori demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pembangunan daerah, partisipasi masyarakat dapat berbentuk konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta berbagai bentuk inisiatif lokal yang melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan demikian, kajian pustaka ini memberikan dasar teoritis yang kuat dalam memahami hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Konsep pembangunan daerah mencakup berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Pembangunan daerah yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dan memperhitungkan potensi serta tantangan yang ada di suatu wilayah (Djadjuli, 2018). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan kemajuan yang tidak hanya bersifat sementara tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Dalam pembangunan daerah, pemerintah memiliki peran utama sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana program pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengalokasikan anggaran secara efektif. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak, seperti sektor swasta, masyarakat, dan organisasi sosial dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Dengan adanya kebijakan yang tepat, pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan mencapai hasil yang diharapkan.

Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat dapat berupa pemberian masukan dalam musyawarah pembangunan, keterlibatan dalam pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap jalannya Pembangunan (Haikal, 2024). Jika masyarakat terlibat secara aktif, maka pembangunan daerah akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan memiliki dampak yang lebih luas.

Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kebijakan pemerintah yang tepat dan berbasis data. Pemerintah harus menyusun perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi dan tantangan di daerah tersebut. Selain itu, regulasi yang jelas dan mudah dipahami juga menjadi faktor kunci dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain kebijakan, ketersediaan sumber daya juga berperan penting dalam pembangunan daerah. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, alam, serta finansial. Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah cenderung lebih mudah untuk berkembang, namun tanpa pengelolaan yang baik, potensi ini tidak akan memberikan manfaat yang maksimal (Fathan Arif Nugroho Yuwono, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Infrastruktur juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan daerah. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, listrik, air bersih, serta akses komunikasi, akan mempermudah aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tanpa infrastruktur yang memadai, pembangunan daerah akan terhambat, terutama dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan daerah.

Selain faktor-faktor tersebut, tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah juga menentukan keberhasilan pembangunan. Daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih maju karena masyarakatnya memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih baik dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh

sebab itu, investasi dalam sektor pendidikan menjadi salah satu langkah penting dalam pembangunan daerah.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan daerah adalah aspek sosial dan budaya. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemahaman terhadap budaya masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa program pembangunan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat setempat (Muntamah et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pendekatan yang bersifat partisipatif dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, sektor swasta, maupun komunitas lokal. Sinergi antara berbagai pihak akan memastikan bahwa pembangunan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dalam pembangunan daerah harus terus diperkuat agar dapat menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah dijelaskan, pembangunan daerah yang ideal dapat terwujud jika dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan (Muntamah et al., 2019). Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan kebijakan pembangunan daerah harus terus dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

B. Peran Pemerintah dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pemerintah memiliki peran penting dalam manajemen pembangunan daerah melalui kebijakan dan regulasi yang diterapkan. Regulasi yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan daerah agar pembangunan berjalan efektif. Setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penyusunan kebijakan juga melibatkan berbagai pemangku

kepentingan untuk memastikan semua kepentingan daerah terakomodasi dengan baik (Marfiani et al., 2018).

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui proses yang terstruktur agar program yang dijalankan memiliki arah yang jelas. Pemerintah daerah harus menyusun rencana strategis yang mencakup visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dokumen perencanaan ini menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan koordinasi antara berbagai pihak agar program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Monitoring secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Evaluasi menjadi tahap yang tidak bisa diabaikan dalam manajemen pembangunan daerah. Pemerintah wajib melakukan penilaian terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk mengukur keberhasilan serta menemukan aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang dilakukan secara berkala membantu dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah di masa mendatang (Mulyadi, 2017).

Transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi. Setiap alokasi dana harus dikelola dengan baik serta dilaporkan secara terbuka kepada publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan serta dampak dari penggunaannya terhadap pembangunan daerah (Marfiani et al., 2018). Akuntabilitas juga menjadi aspek krusial dalam manajemen pembangunan daerah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diterapkan serta penggunaan dana yang dialokasikan. Laporan pertanggungjawaban harus disusun secara jelas dan dapat diakses oleh masyarakat guna memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam implementasi kebijakan pembangunan, terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang sering kali menghambat realisasi program pembangunan. Pengelolaan dana yang efisien menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan ini agar proyek pembangunan dapat tetap

berjalan. Selain keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan kepentingan serta kurangnya komunikasi dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sinergi antarinstansi agar implementasi kebijakan lebih efektif dan efisien (Margaretha Rumbekwan & Nini Adelina Tanamal, 2023).

Tantangan lain yang sering muncul dalam pembangunan daerah adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sangat diperlukan agar program yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah harus terus melakukan inovasi dalam manajemen pembangunan agar setiap kebijakan yang diterapkan memberikan hasil yang optimal. Penggunaan teknologi serta digitalisasi dalam sistem administrasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan. Dengan pendekatan yang adaptif dan responsif, pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat.

C. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan daerah melalui berbagai bentuk partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat berupa keikutsertaan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta kontribusi dalam bentuk tenaga atau materi. Partisipasi ini membantu memastikan bahwa pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi, pembangunan akan lebih efektif karena masyarakat mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungannya (Nuriyatman et al., 2024). Melalui keterlibatan ini, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan yang aktif juga menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar peluang keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan juga meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi mereka. Dengan adanya ruang partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan wawasan mengenai pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk tingkat pendidikan, kesadaran sosial, serta keterbukaan pemerintah dalam melibatkan warga. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan, semakin besar keinginan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Pendidikan yang baik memungkinkan masyarakat lebih kritis terhadap kebijakan yang diterapkan. Kesadaran sosial juga menjadi faktor yang mendorong partisipasi dalam Pembangunan (Setyanto et al., 2018). Jika masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya, maka keterlibatan mereka dalam pembangunan akan lebih aktif. Selain itu, keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi juga berperan dalam meningkatkan partisipasi. Jika pemerintah menyediakan akses informasi yang jelas, masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan dan ikut berperan serta. Pemerintah juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi, seperti membentuk forum musyawarah warga. Tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah, tingkat partisipasi masyarakat akan cenderung rendah.

Akses terhadap informasi juga berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah daerah harus menyediakan saluran komunikasi yang terbuka agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan. Transparansi dalam penyampaian informasi akan mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam memberikan masukan dan pengawasan. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, maka partisipasi mereka dalam pembangunan akan rendah. Informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pembangunan (Sani et al., 2019). Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi, seperti melalui media sosial atau aplikasi digital. Penyampaian informasi yang interaktif juga dapat meningkatkan antusiasme masyarakat. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menciptakan iklim pembangunan yang kondusif. Pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi secara langsung agar masyarakat memahami program yang sedang berjalan. Jika masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, mereka akan lebih siap untuk berpartisipasi aktif.

Pembangunan daerah merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan. Dalam proses ini, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi, di mana pemerintah

bertindak sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana, sementara masyarakat berperan sebagai mitra aktif dalam setiap tahap pembangunan. Manajemen pembangunan daerah yang baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya. Perencanaan yang baik harus berbasis data yang akurat dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam serta melibatkan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Selain sebagai perancang kebijakan, pemerintah daerah juga berperan dalam penyediaan anggaran dan sumber daya. Dengan alokasi dana yang tepat dan transparan, pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta menghindari praktik korupsi yang dapat menghambat kemajuan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai usaha dan pungutan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Sumber utama PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah karena menentukan seberapa besar kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik dan infrastruktur. PAD yang kuat memungkinkan daerah untuk membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dari pusat.

PAD digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan fasilitas publik lainnya. Peningkatan PAD juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Beberapa tantangan dalam meningkatkan PAD adalah

kurangnya kepatuhan wajib pajak, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dan retribusi, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah. Selain itu, masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena lemahnya basis ekonomi lokal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjadi sumber utama penghasilan bagi sebagian besar penduduk. Keberadaan UMKM yang kuat dapat meningkatkan perputaran ekonomi daerah, sehingga berdampak pada peningkatan PAD.

UMKM berkontribusi terhadap PAD melalui pembayaran pajak dan retribusi, seperti pajak restoran, pajak reklame, dan retribusi izin usaha. Selain itu, keberadaan UMKM meningkatkan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pajak daerah dari sektor lain, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Salah satu manfaat utama UMKM adalah kemampuannya menciptakan lapangan kerja. Dengan berkembangnya UMKM, tingkat pengangguran di daerah dapat ditekan, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya beli. Hal ini pada akhirnya juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pajak konsumsi dan pajak tenaga kerja.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung UMKM agar dapat berkembang. Beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan antara lain penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, kemudahan perizinan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah. Meskipun UMKM memiliki potensi besar, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, kurangnya inovasi produk, serta persaingan dengan produk impor dan bisnis besar. Jika tidak diatasi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan pada akhirnya mengurangi potensi kontribusinya terhadap PAD.

Penerapan teknologi digital dalam UMKM dapat meningkatkan daya saing serta memperluas pasar. Dengan adanya transaksi digital, pemerintah daerah juga dapat lebih mudah melakukan pencatatan dan pemungutan pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan PAD. Digitalisasi juga memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Kerja sama antara UMKM dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi lebih

besar terhadap PAD. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak, mengadakan program pelatihan, serta menciptakan regulasi yang mempermudah pertumbuhan UMKM. Sebaliknya, UMKM perlu berkomitmen untuk menjalankan usaha secara legal dan membayar pajak yang sesuai.

Selain pemerintah dan pelaku usaha, masyarakat juga berperan dalam mendukung peningkatan PAD melalui kepatuhan membayar pajak serta mendukung produk-produk lokal dari UMKM. Dengan membeli produk UMKM, masyarakat secara tidak langsung membantu meningkatkan omzet UMKM dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil meningkatkan PAD dengan mengembangkan sektor UMKM. Misalnya, di Yogyakarta, UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan dan kuliner khas daerah mampu menarik wisatawan, yang pada akhirnya meningkatkan pajak daerah dari sektor pariwisata dan perdagangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah. UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, serta pembayaran pajak dan retribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pengawasan dan evaluasi merupakan aspek penting dalam manajemen pembangunan daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memonitor jalannya pembangunan dan menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, kebijakan dapat diperbaiki atau disesuaikan agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Evaluasi yang transparan juga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan turut memberikan masukan yang konstruktif.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), memberikan masukan terhadap kebijakan, serta ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah juga menjadi faktor penentu keberhasilan program-program pemerintah. Masyarakat yang sadar akan hak dan

kewajibannya dapat lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi serta mengawasi jalannya pembangunan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan, seperti merawat infrastruktur dan memanfaatkan fasilitas umum dengan baik, sangat berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai program berbasis komunitas. Program seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, dan pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif merupakan contoh nyata sinergi antara kedua pihak. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

Pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses data dan memahami kebijakan yang diterapkan. Dengan akses informasi yang baik, masyarakat dapat lebih percaya terhadap pemerintah dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pembangunan daerah yang inklusif memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, serta kelompok rentan lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan harus memperhitungkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Salah satu tantangan dalam manajemen pembangunan daerah adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan. Dengan adanya koordinasi yang baik, tumpang tindih kebijakan dapat dihindari dan hasil pembangunan dapat lebih optimal.

Pemerintah juga harus terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah. Dengan adanya aparatur yang kompeten dan profesional, kebijakan pembangunan dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan

kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan juga penting untuk menciptakan komunitas yang mandiri dan produktif.

Peran teknologi dalam pembangunan daerah semakin penting di era digital saat ini. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Penggunaan platform digital untuk konsultasi publik dan penyampaian aspirasi dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam jangka panjang, pembangunan daerah yang sukses harus berorientasi pada kemandirian daerah. Pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi dan pengembangan potensi lokal agar daerah tidak hanya bergantung pada bantuan dari pusat. Dengan demikian, daerah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan, maka mereka akan lebih bersemangat untuk terlibat secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat agar partisipasi yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Jika kepercayaan terhadap pemerintah rendah, masyarakat akan enggan untuk berpartisipasi. Salah satu cara membangun kepercayaan adalah dengan menunjukkan komitmen dalam menjalankan program pembangunan yang transparan dan akuntabel (S, 2018). Jika masyarakat melihat bahwa dana pembangunan digunakan dengan baik, maka mereka akan lebih termotivasi untuk ikut berkontribusi. Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi terhadap inisiatif masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Masyarakat yang percaya terhadap pemerintah cenderung lebih aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Jika kepercayaan ini terus terjaga, maka partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

D. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat agar program

pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menciptakan kolaborasi yang harmonis dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Masyarakat memiliki peran sebagai mitra strategis dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi, anggaran, dan infrastruktur yang mendukung pembangunan, sementara masyarakat berperan dalam memberikan masukan, partisipasi tenaga, serta menjaga hasil pembangunan agar tetap berkelanjutan (Simamora & Sinaga, 2016). Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Salah satu bentuk sinergi yang dapat dilakukan adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara langsung kepada pemerintah daerah. Proses ini memungkinkan kebijakan yang dibuat menjadi lebih partisipatif dan demokratis. Selain itu, berbagai forum komunikasi, seperti kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), juga dapat menjadi sarana efektif dalam menjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam aspek ekonomi, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM (Ubi Laru & Suprojo, 2019). Di sisi lain, masyarakat harus aktif dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan serta berinovasi untuk meningkatkan daya saing usaha mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah dapat berkembang secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dalam bidang sosial dan budaya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terlihat dalam upaya pelestarian budaya lokal. Pemerintah dapat menyediakan regulasi serta fasilitas pendukung untuk kegiatan budaya, seperti festival seni dan pelatihan kesenian daerah. Sementara itu, masyarakat memiliki peran dalam menjaga, mengembangkan, serta mewariskan kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Kolaborasi ini penting untuk

mempertahankan identitas daerah di tengah arus globalisasi yang semakin kuat (Simamora & Sinaga, 2016).

Dalam sektor lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat mencanangkan program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi lingkungan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, menghemat penggunaan sumber daya alam, serta ikut serta dalam program penghijauan akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam bidang infrastruktur, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah dibangun oleh pemerintah. Jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang telah dibangun harus dijaga agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Pemerintah dapat menginisiasi program kerja bakti, gotong royong, atau pembentukan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur daerah Mereka (Syaukat, 2009).

Teknologi dan digitalisasi juga dapat menjadi alat yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemerintah dapat mengembangkan aplikasi atau platform digital untuk menampung aspirasi masyarakat, menyampaikan informasi kebijakan, serta mempermudah akses terhadap layanan publik. Masyarakat diharapkan aktif dalam memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana komunikasi dan pelaporan terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Tantangan dalam mewujudkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat tetap ada, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, minimnya partisipasi publik, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan yang lebih humanis dalam membangun komunikasi yang baik antara kedua pihak. Dengan membangun kepercayaan dan kepedulian bersama, sinergi ini dapat terus diperkuat.

Pembangunan daerah yang sukses tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun sinergi yang kuat

antara kedua pihak merupakan kunci dalam menciptakan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

E. Faktor Penghambat dan Solusi dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor penghambat yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat jalannya pembangunan. Faktor-faktor tersebut mencakup tantangan struktural dalam manajemen pembangunan, hambatan dalam partisipasi masyarakat, serta kurangnya efektivitas dalam implementasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Salah satu tantangan utama dalam manajemen pembangunan daerah adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Proses perizinan yang panjang, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya koordinasi antarinstansi sering kali memperlambat realisasi program pembangunan. Selain itu, desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah juga dapat menimbulkan ketimpangan jika tidak diiringi dengan kapasitas manajerial yang memadai. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan daerah sering menjadi kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan juga masih menjadi tantangan. Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan atau fasilitas umum sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk merawatnya. Kurangnya kepedulian terhadap aset-aset publik ini menyebabkan fasilitas yang telah dibangun menjadi cepat rusak dan memerlukan biaya perbaikan yang besar, faktor Sosial dan Budaya juga salah satu faktor penghambat dalam pembangunan. Di beberapa daerah, masih terdapat pola pikir yang kurang mendukung inovasi dan perubahan, sehingga sulit untuk mengimplementasikan program-program pembangunan yang bersifat modern. Selain itu, konflik sosial di tingkat lokal, seperti persaingan antar kelompok masyarakat atau perbedaan kepentingan, dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan

potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sektor pariwisata, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dikembangkan agar daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri. (Wahed, 2019).

KESIMPULAN

Peran pemerintah dan masyarakat dalam manajemen pembangunan daerah sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah berperan sebagai perencana, pengarah, serta pengawas dalam pelaksanaan pembangunan, sementara masyarakat berkontribusi melalui partisipasi aktif, pengawasan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Sinergi antara keduanya memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan efektivitas program, serta menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga serta mengembangkan hasil pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita Trinura Novitasari. (2022). KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ERA DIGITALISASI MELALUI PERAN PEMERINTAH. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)/Journal of Applied Business and Economic*, 9(2), 184–184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Djadjuli, D. (2018). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Fathan Arif Nugroho Yuwono. (2024). Peran Pemerintahan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Serba Singkong Cirendeu Kota Cimahi. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 10(1), 33–39. <https://doi.org/10.25299/wedana.2024.16984>
- Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R. (2020). Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(2), 128–141. <https://doi.org/10.47134/villages.v1i2.10>

- Marfiani, T., Hartoyo, S., & Manuwoto, M. (2018). ANALISIS POTENSI EKONOMI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI BOGOR BARAT. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 1(1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v1i1.23999
- Margaretha Rumbekwan, & Nini Adelina Tanamal. (2023). PERAN PEREMPUAN DALAM KETAHANAN NASIONAL. *Widya Praja*, 48(2), 203–212. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.3081>
- Mulyadi, M. (2017). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT. *Kajian*, 21(3), 221–236. <https://doi.org/10.22212/kajian.v21i3.776>
- Nuriyatman, E., Mushawiry, R., Fitria, F., Hartati, H., & Repindowaty Harahap, R. (2024). PERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 5(2), 298–303. <https://doi.org/10.52060/jppm.v5i2.2368>
- Sani, B. F., Harianto, H., & Falatehan, A. F. (2019). STRATEGI KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENERAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS E-PLANNING. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i1.27545
- Setyanto, K. A., Harianto, H., & Budiharsono, S. (2018). ANALISIS DAMPAK PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN PADA SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI JAWA TENGAH. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22710
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 79–96. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.895>
- Suyadi, A., & Sofi'i, I. (2022). Progresifitas Peran Organ Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governenance). *Pamulang Law Review*, 5(1), 85. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23612>

Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>.